

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Syarifah Aisza Faradiba Alfi¹, Ida Nuraini²

***Abstract** This study aims to determine how big the management of regional financial to Gross Regional Domestic Product (GRDP) in the District / City of South Kalimantan Province in 2012-2016. The research of variables that used are (1) the ratio of local financial independence, (2) the effectiveness ratio of PAD and (3) capital expenditure. The population in this study were 13 districts / municipalities in South Kalimantan Province and samples were taken by purposive sampling that is all population used as sample. Analyzer used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the management of regional finance has a significant effect on the Gross Regional Domestic Product (GRDP). Based on the results of multiple linear regression test, it is known that the regional financial independence has a significant positive effect to the Gross Regional Domestic Product (GRDP), the effectiveness of PAD has a significant positive effect on Gross Regional Domestic Product (GRDP), and capital expenditure has a significant positive effect on Gross Regional Domestic Product (GRDP).*

Keywords: Regional Financial Management, Regional Financial Independence, PAD Effectiveness, Capital Expenditure, Gross Regional Domestic Product.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengelolaan keuangan daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2016. Variabel penelitian yang digunakan adalah (1) rasio kemandirian keuangan daerah, (2) rasio efektifitas PAD dan (3) belanja modal. Populasi dalam penelitian ini adalah 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dan sampel diambil dengan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda diketahui kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), efektifitas PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektifitas PAD, Belanja Modal, Produk Domestik Regional Bruto.

Pendahuluan

Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto merupakan syarat yang diperlukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan juga merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan suatu daerah. Keberhasilan pembangunan suatu daerah ditandai dengan pengelolaan keuangan daerah yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. (Astuti, 2015)

Salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta mempercepat pembangunan adalah dengan diwujudkannya kebijakan otonomi daerah. Dengan melalui otonomi daerah yang didasarkan pada Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Mardiasmo, 2002)

Menurut Mankiw (2000), PDB sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian yang tujuannya adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai dari penggunaan

¹ Universitas Muhammadiyah Malang. Email : dibaalfi@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Malang. Email : nurainiida@yahoo.com

banyak tenaga tenaga kerja, tidak menghasilkan pertumbuhan pendapatan per kapita, namun jika pertumbuhan ekonomi dicapai dari daerah pusat. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia nampak selalu memberikan prediksi optimistik yang meningkat dari tahun ke tahun. (Suliswanto, 2010)

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengelola sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Mardiasmo, 2002). Dalam mengelola pemerintahannya, daerah memerlukan penilaian untuk melihat apakah pengelolaan keuangan sudah dilakukan secara efisien dan efektif dengan cara menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah. Dengan otonomi, Daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. (Halim, 2004)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya

menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut (Mahmudi, 2009). Wujud dari perimbangan keuangan antar pusat dan daerah diwujudkan melalui dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan khusus kepada daerah untuk menyelenggarakan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang dibiayai atas beban APBD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendanaan utama yang digunakan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya sendiri (Nabilah, Soelistyo, & Kusuma, 2016).

Menurut Kusuma (2016), kemampuan PAD dalam mencukupi anggaran belanja daerah sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan ekonomi, namun pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan lancar jika hanya membebankan kepada pemerintah. Dengan demikian, konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut, pelimpahan kewenangan pemerintah pusat ke daerah harus pula disertai pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah. (Sari, Kindangen, & Rotinsulu, 2014)

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan ditentukan oleh perkembangan aktivitas perekonomian yang dipengaruhi pertumbuhan atau peningkatan perekonomian skala Nasional maupun daerah. Permasalahan keuangan daerah yang masih dihadapi oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu masih terdapat ketergantungan terhadap subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah (Badan Pusat Statistik, 2016)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan mampu menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah harus berperan aktif khususnya sebagai fasilitator dan motivator bagi masyarakat agar kegiatan ekonomi tumbuh berkembang dan optimal sehingga berpengaruh pada peningkatan pendapatan masyarakat (Nuraini & Rochminarni, 2013)

Menurut Kuncoro (2000), untuk mendorong Produk Domestik Regional Bruto yang menjadi ukuran dalam pertumbuhan ekonomi yang menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah maka perlu adanya kinerja keuangan daerah dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas PAD dan belanja modal. Dengan adanya rasio-rasio tersebut dapat digunakan untuk mendorong dan meningkatkan PDRB dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya menciptakan kinerja pemerintah daerah yang bersinergi dan professional (Halim, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dan pengaruh kemandirian keuangan daerah, efektifitas PAD dan belanja modal terhadap PDRB. Beberapa peneliti yang melakukan penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan berupa kemandirian keuangan daerah, efektifitas PAD dan belanja modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mendapatkan hasil yang beragam. Hasil dari penelitian Astuti (2015), rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektifitas berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian Ani & Dwiranda (2014), menunjukkan bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan rasio efektifitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Daniar (2016), mengenai belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.

Berdasarkan pada latar belakang, penelitian terdahulu dan rumusan masalah, maka rumusan hipotesis penelitian yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 1. Diduga kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap PDRB 2. Diduga efektifitas PAD berpengaruh signifikan terhadap PDRB 3. Diduga belanja modal berpengaruh signifikan terhadap PDRB.

Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2012-2016. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif yang menggunakan data sekunder yang bertujuan untuk mengembangkan dan menggunakan model matematis (analisis), teori, dan hipotesis yang kemudian diolah dan dianalisis. Populasi pada penelitian ini adalah 13 kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Teknik pengambilan sampel adalah sampling jenuh.. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Variabel independen adalah kemandirian keuangan daerah (X1), efektifitas PAD (X2) dan belanja modal (X3). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, BPS Kalimantan Selatan dan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian keuangan daerah dengan persamaan sebagai berikut:

$$KKD = \frac{\text{Total penerimaan PAD}}{\text{Total bantuan daerah dan pinjaman}} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

Rasio efektifitas PAD dengan persamaan sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

Analisis regresi dengan data panel dengan persamaan sebagai berikut :

$$\text{LogPDRB}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{KKD}_{it} + \beta_2 \text{EF}_{it} + \beta_3 \text{LogBM}_{it} + c_i + d_t + e_{it} \dots\dots (3)$$

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode *Common Effect*, *Random Effect*, *Fixed Effect*, uji kriteria model menggunakan uji LM Breush-Pagan, uji Chow, dan uji Hausman. Uji statistik antara lain uji F, uji t, dan koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan maupun secara parsial.

Hasil dan Pembahasan

Pemerintah daerah dituntut untuk bisa lebih mandiri dalam mengelola penerimaan daerah yang ditunjukkan untuk proses restrukturisasi pembangunan daerah. Permasalahan yang masih dialami oleh kabupaten/ kota Provinsi Kalimantan Selatan adalah masih tergantung dengan bantuan dana dari pusat. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pun menjadi kurang. Kemandirian keuangan daerah perlu diperhitungkan untuk mengetahui seberapa mandiri suatu daerah

tersebut. Kemandirian keuangan daerah diukur melalui rasio yang berdasarkan perbandingan antara total penerimaan pendapatan asli daerah dengan total bantuan dari pusat/ pinjaman pemerintah pusat . Berikut hasil perhitungan kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 1.
Persentase Kemandirian Keuangan Daerah Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2016

No	Kabupaten	2012	2013	2014	2015	2016
1	Tanah Laut	10.55	11.03	16.75	25.88	23.54
2	Kotabaru	13.65	13.32	17.63	17.90	22.14
3	Banjar	15.52	18.21	24.79	23.30	22.14
4	Barito Kuala	4.38	4.57	4.13	6.35	8.90
5	Tapin	7.12	7.35	8.63	12.40	13.75
6	Hulu Sungai Selatan	14.36	12.74	14.22	15.84	16.65
7	Hulu Sungai Tengah	8.98	10.79	13.44	18.96	18.90
8	Hulu Sungai Utara	8.61	7.55	10.87	14.96	17.30
9	Tabalong	14.10	16.21	16.49	22.69	24.24
10	Tanah Bumbu	8.85	7.50	17.31	23.35	20.42
11	Balangan	13.97	9.58	9.14	11.68	9.81
12	Kota Banjarmasin	22.09	24.17	26.64	32.51	37.90
13	Kota Banjarbaru	13.44	15.15	19.29	29.33	35.61
Rata-Rata		11.97	12.17	15.33	19.63	20.87

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Data Diolah (2018)

Dari tabel 1, dapat diketahui bahwa kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2016 peningkatan di setiap tahunnya. Terlihat pada tahun 2012 sebesar 11.97%, tahun 2013 sebesar 12.17%, tahun 2014 sebesar 13.33%, tahun 2015 sebesar 19.63%, dan tahun 2016 sebesar 20.87%. Dari tabel di atas dapat diketahui kemandirian keuangan daerah ini mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Namun, sesuai kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Selatan termasuk pada kategori rendah sekali karena berada diantara 0-25%. Akan tetapi meskipun termasuk pada kriteria rendah sekali, kemandirian keuangan daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang berarti mulai mengurangi bantuan dari pemerintah pusat dan daerah mulai mandiri.

Efektifitas pendapatan asli daerah berhubungan dengan derajat keberhasilan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah. Permasalahan keuangan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan yang masih kurang mandiri dalam mengelola pendapatan asli daerahnya tentu berpengaruh pada realisasi penerimaan PAD yang kurang. Pemerintah pun kurang kreatif dalam menggali potensi daerah untuk meningkatkan penerimaan PAD. Efektifitas pendapatan asli daerah merupakan rasio yang diukur berdasarkan perbandingan antara realisasi penerimaan PAD dan target penerimaan PAD. Hasil perhitungan efektifitas PAD Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.
Persentase Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2016

No	Kabupaten	2012	2013	2014	2015	2016
1	Tanah Laut	187.80	213.65	171.99	134.14	117.35
2	Kotabaru	78.33	132.52	106.38	140.89	104.23
3	Banjarnegara	177.10	177.48	103.51	112.87	118.76
4	Barito Kuala	125.40	158.96	328.88	205.04	122.71
5	Tapin	123.92	132.34	154.61	120.04	92.15
6	Hulu Sungai Selatan	88.78	106.32	125.19	132.97	143.21
7	Hulu Sungai Tengah	110.51	100.05	129.36	90.10	96.99
8	Hulu Sungai Utara	107.81	145.81	187.62	146.74	112.09
9	Tabalong	91.91	108.27	171.29	125.68	118.89
10	Tanah Bumbu	265.52	282.31	160.00	117.67	122.16
11	Balangan	105.60	123.95	185.95	134.05	161.05
12	Kota Banjarmasin	114.27	109.67	119.79	102.45	91.98
13	Kota Banjarbaru	149.61	146.12	165.83	133.07	108.92
Rata-rata		132.81	149.03	162.34	130.44	116.19

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Data Diolah (2018)

Dari tabel 2, dapat diketahui bahwa efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Terlihat pada tahun 2012 sebesar 132.81%, tahun 2013 sebesar 149.03%, tahun 2014 sebesar 162.34%, tahun 2015 sebesar

130,44% dan tahun 2016 sebesar 116,19%. Dari tabel 2, dapat diketahui efektifitas PAD ini mengalami fluktuasi dikarenakan penerimaan PAD di beberapa kabupaten/ kota kurang merata. Namun, sesuai kriteria penilaian efektifitas PAD di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan tergolong sangat efektif karena standar persentase lebih dari 100%.

Belanja modal digunakan sebagai pembiayaan dalam membangun infrastruktur dan dapat menjadi investasi baru bagi perekonomian daerah. Permasalahan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Selatan yang lamban mengakibatkan alokasi belanja modal kurang. Pembangunan yang lamban disebabkan oleh kewenangan pemerintah daerah yang kurang terhadap melakukan pembangunan infrastruktur. Berikut belanja modal di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Selatan :

Tabel 3.
Belanja Modal Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2016
(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Kabupaten	2012	2013	2014	2015	2016
1	Tanah Laut	188,302	294,426	386,019	548,875	784,655
2	Kotabaru	270,513	336,961	576,611	486,634	590,560
3	Banjarnegara	213,588	229,071	241,134	244,499	313,519
4	Barito Kuala	157,239	236,616	243,747	285,044	463,760
5	Tapin	267,000	314,731	389,187	420,325	559,798
6	Hulu Sungai Selatan	130,247	154,696	210,248	277,810	160,507
7	Hulu Sungai Tengah	164,697	238,023	284,269	268,612	380,178
8	Hulu Sungai Utara	163,444	186,108	218,689	244,021	502,306
9	Tabalong	258,496	214,674	398,113	312,877	515,547
10	Tanah Bumbu	212,946	429,220	594,963	435,235	416,987
11	Balangan	213,916	255,882	279,854	250,626	352,057
12	Kota Banjarmasin	248,205	345,162	390,670	437,794	410,773
13	Kota Banjarbaru	126,779	196,959	380,107	399,273	434,787
Rata-rata		201,182	264,041	353,355	354,740	452,726

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Data Diolah (2018)

Dari tabel 3, dapat diketahui bahwa belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2016 peningkatan di setiap tahunnya. Terlihat pada tahun 2012 sebesar Rp 201.182, tahun 2013 sebesar Rp 264.041,

tahun 2014 sebesar Rp 353.355, tahun 2015 sebesar Rp 354.740 dan tahun 2016 sebesar Rp 452.726. Dari tabel 3, dapat diketahui belanja modal mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pertambahan belanja modal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai memaksimalkan penggunaan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dan mengurangi bantuan dari pemerintah pusat. Berdasarkan hasil regresi dengan menggunakan program eviews diketahui hasil estimasi menggunakan teknik *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect* adalah sebagai berikut:

Common Effect

Dari hasil *Common Effect* didapatkan model estimasi dibawah ini :

$$\text{LogY} = 7.052646 + 0.014329X_1 + 0.001057X_2 + 0.471668\text{Log}X_3 + e_{it} \dots(4)$$

Fixed Effect

Dari hasil *Fixed Effect* didapatkan model estimasi dibawah ini :

$$\text{LogY} = 11.67023 + 0.003880X_1 + 0.000193X_2 + 0.094281\text{Log}X_3 + e_{it} \dots(5)$$

Random Effect

Dari hasil *Random Effect* didapatkan model estimasi dibawah ini :

$$\text{LogY} = 11.66661 + 0.003946X_1 + 0.000197X_2 + 0.094455\text{Log}X_3 + e_{it} \dots(6)$$

Untuk memilih model panel mana yang sesuai paling sesuai untuk digunakan dalam model, maka perlu digunakan perbandingan antara model-model *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect* dengan menggunakan Uji Chow, Uji Hausman dan Uji LM Breush-Pagan, untuk mengetahui model terbaik yang akan digunakan dalam mengestimasi pengaruh variabel.

Tabel 4
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	829.850478	(12,49)	0.0000
Cross-section Chi-square	345.750625	12	0.0000

Sumber : Eviews9, Data Diolah (2018)

Berdasarkan hasil dari tabel 4, menunjukkan Probabilitas F = 0,0000. Nilai tersebut lebih kecil dari kriteria yang telah ditentukan yaitu $0.0000 < 0.05$. Sehingga dapat dikatakan bahwa model *Fixed Effect* (FE) lebih tepat atau lebih sesuai digunakan daripada model *Common Effect* (CE).

Tabel 5.
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	12.589423	3	0.0056

Sumber : Eviews9, Data Diolah (2018)

Berdasarkan hasil dari tabel 5, menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross section random* pada uji hausman sebesar 0.0056 sehingga dapat diketahui bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa estimasi menggunakan model *random effect* ditolak yang artinya model yang lebih sesuai adalah model *fixed effect*.

Tabel 6.
Hasil Uji Langrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	78.75033 (0.0000)	0.696630 (0.4039)	79.44696 (0.0000)
Honda	8.874138 (0.0000)	0.834643 (0.2020)	6.865146 (0.0000)
King-Wu	8.874138 (0.0000)	0.834643 (0.2020)	5.159892 (0.0000)
Standardized Honda	10.02946 (0.0000)	1.582192 (0.0568)	5.098340 (0.0000)
Standardized King-Wu	10.02946 (0.0000)	1.582192 (0.0568)	3.551189 (0.0002)
Gourieriou, et al.*	--	--	79.44696 (< 0.01)

Sumber : Eviews9, Data Diolah (2018)

Berdasarkan hasil dari tabel 6, diperoleh prob *Breusch-Pagan* sebesar 0.0000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0.05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *random effect* lebih sesuai daripada model *fixed effect*. Berdasarkan pemilihan regresi panel yang telah dilakukan melalui uji chow, uji hausman, dan uji langrange multiplier pada penelitian ini digunakan hasil regresi data panel menggunakan metode *Fixed Effect*.

Jika X dianggap tetap maka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel dependen PDRB (Y) akan mengalami penurunan sebesar 11.67023. Variabel kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB. Nilai koefisien sebesar 0.003880. Hal ini berarti jika kemandirian keuangan daerah (X1) mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka PDRB akan mengalami kenaikan sebesar 0.003880 juta rupiah. Hal ini sesuai dengan hipotesis. Variabel efektivitas PAD berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB. Nilai koefisien sebesar 0.000193. Hal ini berarti jika efektivitas PAD (X2) mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka PDRB akan mengalami kenaikan sebesar 0.000193 juta rupiah. Hal ini sesuai dengan hipotesis. Variabel belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB. Nilai koefisien sebesar 0.094281. Hal ini berarti jika belanja modal (X3) mengalami kenaikan sebesar 1 juta rupiah maka PDRB akan mengalami kenaikan sebesar 0.094281 juta rupiah. Hal ini sesuai dengan hipotesis.

Dengan hasil *Fixed Effect Model* tersebut kemudian dilakukan Uji t, Uji F, dan R-Square pada output *Fixed Effect*, berdasarkan model persamaan untuk *Fixed Effect*.

Berdasarkan nilai probabilitas t-Statistik untuk variabel Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 0.0000. Nilai tersebut lebih kecil dari α 0.05.

Sehingga dapat diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_1 . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB. Berdasarkan nilai probabilitas t-Statistik untuk variabel Efektivitas PAD sebesar 0.0063. Nilai tersebut lebih kecil dari α 0.05. Sehingga dapat diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_1 . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas PAD berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB. Berdasarkan nilai probabilitas t-Statistik untuk variabel Belanja Modal sebesar 0.0001. Nilai tersebut lebih kecil dari α 0.05. Sehingga dapat diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_1 . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB.

Uji F merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh semua variabel secara bersama-sama yaitu variabel independen antara lain Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD dan Belanja Modal terhadap variabel dependen (variabel terikat) yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan. Berdasarkan nilai Probabilitas F-Statistik yaitu sebesar 0.000. Dimana 0.0000 lebih kecil dari α 0.05. Sehingga diputuskan menolak H_0 dan menerima H_1 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD dan Belanja Modal berpengaruh secara signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Koefisien determinasi (R^2) pada umumnya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Adapun nilai R^2 berdasarkan uji regresi data pada tabel diatas sebesar 0.9968 atau sebesar 99.68% yang berarti nilai tersebut besar dari 0.5 atau 50% sehingga kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen kuat. Pengaruh kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD dan belanja modal adalah sebesar 99.68% sedangkan sisanya 0.32% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan dapat dinyatakan bahwa kondisi keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan melalui kemandirian keuangan daerah sudah mengalami peningkatan setiap tahunnya walau masih termasuk dalam kategori persentase rendah sekali tetapi dengan peningkatan setiap tahun ini menunjukkan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan mulai mengurangi bantuan dari pemerintah pusat yang akan mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan PDRB. Efektivitas pendapatan asli daerah sudah sangat efektif walau cenderung fluktuatif (naik turun) yang mengakibatkan pemerintah daerah lebih mandiri dan PAD yang dimiliki lebih meningkat untuk pembangunan daerah yang meningkatkan PDRB. Belanja modal yang mengalami peningkatan setiap tahunnya membuktikan bahwa pemerintah daerah mulai mengoptimalkan pembiayaan infrastruktur untuk pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Pembangunan infrastruktur yang optimal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan mempengaruhi peningkatan PDRB.

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dinyatakan bahwa secara parsial kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Dengan nilai R square sebesar 0.9968 atau 99.68% sedangkan sisanya 0.0032 atau 0.32% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani, N. ., & Dwiranda, A. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Akutansi*, 6(3), 481–495.
- Astuti, W. (2015). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Periode 2007-2011). *EB BANK*, 6(1), 1–18.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2016*. Banjarmasin: BPS Kalimantan Selatan.
- Daniar, E. (2016). *Pengaruh Belanja Modal dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur*. Universitas Airlangga.
- Halim, A. (2004). *Akutansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, M. (2000). *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kusuma, H. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(1), 1–11.

- Mahmudi. (2009). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, G. N. (2000). *Makroekonomi Edisi Keenam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nabilah, N. A., Soelistyo, A., & Kusuma, H. (2016). Analisis Flypaper Effect PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(2), 190–203.
- Nuraini, I., & Rochminarni, A. B. (2013). Potensi Sumber Daya Daerah dan Kesejahteraan Keluarga TKI. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(2), 210–226.
- Sari, G. N., Kindangen, P., & Rotinsulu, O. T. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan di Sulawesi Utara Tahun 2004 – 2014. *Jurnal Ekonomi*, 1–19.
- Suliswanto, W. S. . (2010). Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 357–366.